

# Sumbawa: Islamisasi, Makasarisasi, dan Subordinasi

Mohammad Ali Fadillah

**Keywords:** history; east nusa tenggara; kingdoms; trade; islamization; acculturation

## How to Cite:

Fadillah, M. A. (1990). Sumbawa: Islamisasi, Makasarisasi, Dan Subordinasi. *Berkala Arkeologi*, 11(1), 27-47. <https://doi.org/10.30883/jba.v11i1.549>



## Berkala Arkeologi

<https://berkalarkeologi.kemdikbud.go.id/>

Volume 11 No. 1, Maret 1990, 27-47

DOI: [10.30883/jba.v11i1.549](https://doi.org/10.30883/jba.v11i1.549)

# SUMBAWA: ISLAMISASI, MAKASARISASI, DAN SUBORDINASI

oleh:  
**Mohammad Ali Fadillah**

Pulau Sumbawa relatif tidak terlalu subur -- meski bukan berarti tidak produktif -- kenyataannya bukit dan pegunungan yang menjulang di pulau itu lebih menjanjikan daya pikat panorama alam. Curah hujan yang kecil mungkin penyebab fertilitas lahan hanya bisa didapatkan pada daerah Alas, sebagian Bima, dan Dompu Tengah, selebihnya berupa hamparan padang rumput dan hutan menghijau di kaki bukit atau lereng pegunungan.

Inilah kendalanya mengapa produk pertanian tidak begitu menonjol, tetapi sesungguhnya potensial bagi sub-sistensi peternakan dan hasil hutan. Dari catatan sejarah dapat diketahui bahwa selain kerbau, sapi, dan babi, konon di abad 16 – 17 kuda Sumbawa atau terkenal dengan Kuda *Kore*-nya telah menjadi komoditas penting dari pulau Sumbawa.<sup>1)</sup> Setidaknya demikianlah kisah pe-ngembara bangsa Portugis, Tome Pires dalam catatan perjalanannya di kepulauan Indonesia timur. Kecuali itu Kayu Sappang (*sappan wood*) juga telah menjadi primado-na eksport Sumbawa yang selalu dicari para pedagang untuk dipasarkan ke negeri Cina atau belahan benua lain melalui Malaka.<sup>2)</sup>

Secara ekonomis nampaknya memungkinkan bagi pe-ngembangan masyarakat di daerah ini, namun produksi itu tidak dengan sendirinya merubah Sumbawa menjadi bandar yang menguntungkan dengan pengawasan penguasa lokal, malahan Sumbawa hanya menjadi daerah produ-sen yang selalu dieksploitasi kerajaan-kerajaan lain yang kuat dan berpengaruh. Ini semua antara lain disebabkan karena pada masa itu di Sumbawa tidak ada kesatuan politik yang solid, apalagi acuan kehidupan masyarakat Sumbawa senantiasa berkisar pada diferensiasi etnik, dengan *samawa* dan *mbojo* sebagai subetnis dominan, se-

hingga memungkinkan kepala-kepala suku -- para *ntjuhi* dan *tau loka* -- pemegang kendali mobilitas sosial di pulau yang memiliki teluk strategis itu kehilangan otoritas teritorialnya.

### **Periode Hindu-Buddha dan Islam Awal**

Tidak adanya sistem kekuasaan yang kuat menjadikan daerah itu selalu rawan politik dan hanya menjadi ajang pergolakan berbagai kekuatan yang lebih besar. Ketika dinamika sosial ekonomi belum begitu rumit, Sumbawa telah menjadi bagian dari zaman Klasik Hindu-Buddha. Corak Hinduisme - Buddhisme di Pulau Sumbawa dapat dibuktikan dengan adanya situs Batu Pahat (*Wadu Paa*) yang terletak di pantai barat teluk Bima.

Situs ini merupakan kompleks pemujaan yang bahkan menunjukkan faham sinkretisme Hindu-Buddha. Serangkaian penelitian arkeologis telah berhasil mencatat beberapa data menarik, sebab pada situs tersebut didapatkan sejumlah tinggalan Hindu dan Buddha pada tahap awal perkembangan agama ini di Indonesia bagian timur. Ada indikasi anasir Hindu-Buddha ini telah masuk ke Sumbawa sejak abad 10 – 11 Masehi dengan dijumpainya relief Agastya, Ganesha, dan Buddha pada ceruk gua karang. Kecuali itu ada pula fragmen arca beserta lapiknya, relief stupa yang menyerupai bangunan meru di Bali, serta sempalan lingga-yoni.

Dengan menilik karakteristik temuan, maka dugaan bahwa Hinduisme diperkenalkan pertama kali oleh Majapahit perlu ditinjau lagi. Di dekat situs ini terdapat sebuah tempat yang bernama Sowa, mengingatkan kita pada nama *Suwal* yang disebut dalam Prasasti Blanjong di Semawang (Sanur) sebagai daerah taklukan Raja Kesari Warmadewa, tokoh pendiri dinasti Warmadewa di Bali abad 10 Masehi. Dihubungkan dengan data toponimi ini, ada sementara ahli yang mengasumsikan bahwa situs Batu Pahat mungkin berasal dari masa Kesari Warmadewa.<sup>3)</sup> Kalau dugaan ini benar maka walaupun dengan

sangat hati-hati dapatlah dikatakan bahwa ekspedisi Majapahit ke Sumbawa di abad 14 bukanlah awal masuknya pengaruh Hindu.

Namun tendensi ini masih asumptif, dan oleh karena itu masih memerlukan pembenaran dengan lebih banyak menghimpun data penunjang, dalam arti bahwa -- kecuali aspek religius -- belum bisa diperoleh kepastian bagaimana kecenderungan penguasaan Sumbawa secara keseluruhan dalam konstelasi politik dan ekonomi dinasti Warmadewa.

Lain halnya dengan ketika Majapahit mencapai zaman keemasannya. Ekspedisi Majapahit pimpinan Mpu Nala di tahun 1357 menjadi bukti superioritas kerajaan Hindu itu di wilayah timur Nusantara, hingga mampu mempertebal sentuhan Hinduisme. Demikian penting "event" itu maka Prapanca perlu menggoreskan peristiwanya di atas kropak lontar, menjadikan Negarakertagama sebagai sumber tertulis pertama yang menyebut Taliwang, Seran, Utan Kadali, Dompu, Bima, dan Sang Hyang Api sebagai daerah taklukan Majapahit di pulau Sumbawa.<sup>4)</sup>

Dengan merembesnya anasir Hindu itu, Sumbawa mulai mengenal konsep "nagari" dan status seorang raja -- yang kendati mendorong lahirnya kerajaan-kerajaan kecil -- tetapi Bima, Dombu, dan Sumbawa serta kerajaan lain yang disebut Prapanca tetap mengibarkan panji-panji kebesaran Majapahit. Memang pengaruh itu mampu menggantikan gelar-gelar lokal menjadi gelar Hindu; Dewa dan Batara menjadi nama raja, dan bahkan nama kerajaan mengadopsi "epic" Mahabrata dengan Bima sebagai tokoh sentral.<sup>5)</sup> Tetapi karena sistem pengawasan yang tidak lagi ketat setelah melemahnya kekuasaan Majapahit, Sumbawa pada akhirnya tidak menjadi bagian dari kultur Hindu Jawa seperti halnya Bali. Tampaklah bahwa Hinduisme diperkenalkan tidak begitu mendalam, sebab mungkin invasi Majapahit ke Sumbawa amat politis. Itu sebabnya *hadat* dan tradisi lokalitas Sumbawa

tetap berperan, baik dalam sistem kepercayaan maupun tata pemerintahan orang Sumbawa.

Kebangkrutan Majapahit di akhir abad 15 merupakan peluang kerajaan taklukan untuk memproklamirkan kedaulatan wilayahnya. Tetapi tidak pula menyelesaikan persoalan, sebab konflik intern di negeri Sumbawa segera meruncing. Persaingan antar kerajaan kecil adalah akibatnya, dengan "ketuanan-penghambaan" sebagai identitas formula yang dicari pada pasca Majapahit.<sup>6)</sup>

Lahirnya negara Demak yang bercorak Islam awal abad 16 diakui membawa babak baru dalam percaturan politik di Nusantara, namun tidaklah demikian halnya di Sumbawa. Memang pedagang-pedagang Muslim dari berbagai tempat turut memajukan ekonomi kerajaan di wilayah timur Nusantara, tetapi eksekutif politiknya tidak menajam. Ini barangkali karena hubungan kota-pedalaman kurang efektif, sehingga dinamika kota-kota pelabuhan yang dipilih sebagai ibukota kerajaanlah yang segera menguat.

Iklm baru ini membuat kota-kota pelabuhan sekaligus menjadi pusat perekonomian kerajaan sehingga tumbuh beberapa pelabuhan penting seperti Bima, Pekat, Tambora, Sanggar, dan Sape. Melalui pelabuhan itulah kuda, kayu sappang, beras, kacang-kacangan, bawang, rotan, madu, lilin, sarang burung, dan kain tenun dieksport.<sup>7)</sup> Dengan begitu Sumbawa menjadi pelabuhan persinggahan penting di perairan timur kepulauan Nusantara. Koloni para pedagang dengan sendirinya bermunculan di pelabuhan-pelabuhan itu. Bukan tidak mungkin Islam yang telah memberi corak pada kota-kota pelabuhan di pesisir utara Jawa, juga terintegrasi di Sumbawa, terutama setelah kedatangan Sunan Prapen (1520–1530).<sup>8)</sup> *Babad Lombok* memang menceritakan betapa Islamisasi dengan lancarnya sampai di Dompu dan Bima, tetapi tidak juga sampai merambah pedalaman, sehingga tradisi lama tetap menjiwai perilaku masyarakat dan

penguasa lokal di Sumbawa.<sup>9)</sup> Maka Islam yang diperkenalkan dalam era kejayaan Demak tidak sampai membebas baik secara kultural maupun politis, kecuali motivasi ekonomis belaka.

### **Islamisasi dan Makasarisasi di Pulau Sumbawa**

Menginjak abad 17 ketentraman kerajaan di Sumbawa mulai meriak lagi, bahkan semakin bergoyang terutama setelah invasi Makasar pertama di Bima 1618. Peristiwa itu telah dimuat dalam Buku "*lontara*" Harian Kerajaan Gowa-Tallo, manakala Lokmok Mandalle, panglima perang Gowa mendaratkan 9 buah armada perangnya di pantai utara Bima. Kemudian di tahun 1619 untuk kedua kalinya ekspedisi Makasar dilakukan, saat Karaeng Moroanging bersama pasukannya -- kecuali mengukuhkan kemenangan di Bima -- juga dapat menaklukkan Kerajaan Sumbawa. Tetapi karena ekspedisi itu tidak berhasil menguasai Sumbawa secara keseluruhan, maka di tahun 1626 dengan dipimpin langsung Mangkubumi Gowa, Karaeng Matoaya, pasukan besarnya merajah tanah Sumbawa. Setelah sukses menanamkan pengaruhnya di Buton, pada gilirannya sampai juga di Sumbawa; kerajaan Bima, Sumbawa, Dompu, Pekat, Sanggar, Tambora, dan Utan menyerah lalu menjadi bagian dari Makasar Raya. Kalau ekspedisi itu tidak menggemparkan, mungkin akan luput dari catatan *Dagh Register* 22 Mei – 31 Agustus 1626. Malahan dipublikir Belanda bahwa Raja Gowa selain menaklukkan Sumbawa dan Bima juga Ende dan Solor serta pulau-pulau kecil di Nusatenggara. Kendati pendek dan dangkal, cengkeraman kekuasaan Makasar meninggalkan bekas yang dalam pada kehidupan politik dan adat istiadatnya.

Penyerbuan Makasar ini mungkin dilatari semangat Islamisasi yang sedang digalakkan di Sulawesi Selatan. Di awal abad 17 itu tampak bagaimana Islam memberi inspirasi pada Gowa untuk menundukkan kerajaan-kerajaan lain di tanah Bugis, sehingga status *karaeng-atta* men-

jadi pola hubungan antara Makasar dengan vasal-vasalnya.<sup>10)</sup> Dengan sendirinya Sumbawa adalah bagian dari persemakmuran ini. Tetapi jika mengingat tradisi yang telah lama berlangsung di Sulawesi Selatan tentang legalitas kemaharajaan Gowa-Tallo di tanah Bugis Makasar, intervensi Gowa bukanlah karena Islamisasi semata, tetapi erat kaitannya dengan kondisi lokalitas yang telah mentradisi sebelum Islam menjadi anutan resmi di Makasar.<sup>11)</sup>

Faktor ekstern juga tidak dapat diabaikan sebagai penyebabnya, karena ketika Gowa menjadi pusat perniagaan di wilayah timur Nusantara, pedagang Portugis, Spanyol, dan Belanda pun turut bersaing dalam upaya monopoli perdagangan di perairan Sulawesi dan Maluku. Sehingga hegemoni Gowa tidak terlepas dari orientasi ekonomis. Dengan begitu kemenangan Belanda di Maluku 1607 dan kedudukannya di Banda serta terusirnya pedagang Portugis dari pulau rempah-rempah menimbulkan kekhawatiran di kalangan penguasa Gowa, apalagi ketika utusan VOC, mengharap Sultan melarang rakyat Makasar memasok barang-barang dagangan di Malaka yang nota bene memusuhi VOC.<sup>12)</sup> Maka ekspedisi Makasar ke Sumbawa merupakan langkah preventif untuk melindungi kepentingan dagangnya di kepulauan selatan.

Kenyataannya Belanda memang mulai melirik daerah selatan. Ketika VOC sedang giatnya mencari bahan makanan dan produk lokal lain, kapal-kapal Portugis pada bulan Desember—Januari setiap tahunnya sudah berlayar ke pantai utara Sumbawa untuk mencari kayu sapang. Atas kenyataan ini VOC merasa perlu membuka hubungan dagang dengan Bima.<sup>13)</sup>

Kesempatan ini malahan dimanfaatkan raja Bima untuk membuka diri dan kapal-kapal VOC yang tiba di Solor Juni 1618 diundang untuk membeli beras. Maka dua bulan kemudian, tepatnya 8 Agustus 1618 VOC mendarat di Bima -- sebagaimana juga dilakukannya di Patani, Kamboja, dan Koromandel -- kedatangan VOC pada

awalnya untuk memenuhi kebutuhan pangan dengan cara berdagang. Pada tahun itu kapal VOC rupanya semakin banyak berkeliaran di perairan utara Nusatenggara. Ini mungkin ditunjukkan untuk membendung pengaruh Makasar di Solor, Timor, dan Sumbawa, sebab "*Arent*" dan "*Groene Leeuw*", dua kapal Belanda pimpinan Crijn van Raemborch ternyata juga membawa 25 prajurit untuk menghadang Portugis dan Makasar di Solor.<sup>14)</sup>

Sesungguhnya tindakan itu dilakukan untuk menunjukkan kredibilitas VOC di mata penguasa Bima dan Sumbawa. Menciptakan persahabatan dengan Bima, barangkali demi keuntungan politik Belanda ketika ketegangan melanda Bima dan Makasar. Paling tidak aspek finansial dapat dipetik dari momentum itu, sehingga Belanda berani mendaratkan para pedagangnya yang dipimpin Gerad Velincx dalam upaya mengumpulkan beras untuk dikapalkan. Tetapi Velincx justeru tertawan di sana, sehingga beras, ternak, dan komoditas lain tidak berhasil diperoleh.<sup>15)</sup>

Konflik Belanda-Portugis akhirnya meletup setelah kapal "*Nassau*" dan "*Bergerboot*" tiba di Ambon mendengar kabar bahwa kota Bima porak-poranda, orang Bima dibunuh, dan penduduk lari ke gunung dengan membawa beras, babi, kerbau dan kuda. Belanda kemudian menuding Portugislah biang keladinya, sebab VOC telah menemukan fregat Portugis di teluk Sape. Itu sebabnya kapal Portugis ditawan yang kemudian menjadi jaminan pembebasan Gerard Velincx.<sup>16)</sup>

Konflik Belanda dan Portugis di perairan Sumbawa ini kemudian ditanggapi serius oleh Gowa, yang memang amat berkepentingan atas daerah itu sebagai jalur perniagaan tradisionalnya. Mudah dipahami, mengapa lantas Gowa menginginkan Sumbawa menjadi vasalnya, setelah Ternate dan Ambon sedikit demi sedikit jatuh di bawah pengaruh VOC.

Ketika intimidasi VOC tidak lagi dapat ditolerir, persekutuan Gowa-Ternate akhirnya menyerang kedudukan Belanda di perairan Maluku (1627–1630) setelah segala perundingan mengalami kegagalan. Dan kontak senjata itu semakin menjadi karena VOC menghancurkan ladang cengkeh di Maluku dan banyak menimbulkan korban di kedua belah pihak.<sup>17)</sup>

Memang ketegangan sementara dapat diredam dengan lahirnya perjanjian kerjasama dagang atas prakarsa Gubernur Jenderal Van Diemen 1637, yang telah meratifikasi perdagangan bebas dan perdamaian abadi. Tetapi ini tidak lama berlangsung, sebab Belanda semakin merajalela di perairan timur dan berhasil mengadu-domba vasal Makasar di Maluku, sehingga persaingan dagang identik dengan krisis politik VOC-Gowa atas wilayah rempah-rempah.

Perjanjian selanjutnya tidak pernah berhasil, karena kerjasama dagang pada dasarnya untuk monopoli VOC. Karena kekhawatiran Gowa atas ulah VOC itu, Makasar perlu merekrut vasalnya di Sumbawa dengan ikatan perkawinan. Raja Bima yang condong ke Makasar, Wata Wadu, dikawinkan dengan Daeng Sikontu, ipar Sultan Alauddin pada 2 Desember 1640 dan dianugerahi gelar Sultan Abul Kahir untuk menjadi Sultan Bima I, kemudian raja Sumbawa yang bernama Mas Cini juga dikawinkan dengan Karaeng Panaikang dari Tallo pada 24 Desember 1640. Di masa inilah pengaruh Gowa melanda sistem politik dan struktur pemerintahan kerajaan-kerajaan taklukan di Sumbawa.<sup>(18)</sup> Data arkeologis yang berasal dari periode ini juga menunjukkan begitu kuatnya pengaruh Bugis Makasar dalam sistem budaya orang Sumbawa dengan pengadopsian aspek-aspek arsitektural dan tekstual baik pada bangunan istana, mesjid, makam para raja, dan tradisi penulisan buku harian kerajaan.

Rekrutmen Makasar memang berhasil dan di bawah panji-panji Makasar persekutuan ini senantiasa dapat

menghambat laju penetrasi Belanda. Buktinya ketika terjadi pergolakan di Makasar, Bima berada di belakang Gowa dengan merampas kapal Belanda (1660) dan baru dapat dikembalikan setelah kompeni berhasil memaksa Bima menandatangani perjanjian. Tetapi itu juga tidak membuat mereka jera, sebab 1665 ketika pertikaian semakin memuncak di Buton, kerajaan Bima, Dompu, Sanggar, dan Tambora ambil bagian dalam perang melawan kekuatan VOC.<sup>19)</sup>

### **Subordinasi dan Transformasi Politik**

Ketika pada akhirnya Jumat 18 Nopember 1667 perjanjian Bungaya harus ditandatangani -- pertanda kemenangan kompeni -- penetrasi Belanda menemui bentuknya yang nyata. Pasal 14, 15, dan 23 dari *Het Bunga-isch Verdrag* itu menyatakan bahwa Kerajaan Gowa harus menyerahkan Bima dan taklukannya kepada kompeni serta mendeportasikan raja Bima, Dompu, Tambora, Sanggar karena "dosanya" telah melakukan pembunuhan orang-orang Belanda di Bima.

Dengan perjanjian ini Sumbawa memang terlepas dari hegemoni Makasar, tetapi dengan terpaksa harus berganti tuan kepada Belanda. Sejak itulah penetrasi Belanda merambah pada hampir semua aspek kehidupan masyarakat terutama politik dan ekonomi, sehingga daerah taklukan sebagai terdaftar dalam "*Cappaya ri Bungaya*" semakin kehilangan kedaulatannya. Sementara bekas vasal Makasar di Sumbawa dibiarkan memiliki kedaulatan adat dan kebudayaannya, subordinasi Belanda sudah terlalu jauh memasuki persoalan intern kerajaan. Pada gilirannya kompeni bukan saja berwenang dalam pergantian tahta dan menentukan haluan politik, bahkan juga dalam pengangkatan elite birokrasi tradisional.

Menjadi jelas, mengapa VOC dengan sengaja tidak menghancurkan kerajaan-kerajaan tradisional, sebab dengan begitu raja taklukan dapat dipakai sebagai alat

eksploitasi bagi tujuan politik kolonial di daerah yang demikian luas. Sukar untuk diragukan kalau akibat transformasi politik itu adalah semakin sempitnya gerakan penguasa tradisional untuk mengembangkan kapasitas dan substansialnya. Maka semakin terbataslah ruang gerak mereka. Dan, ketergantungan kepada Belanda akhirnya tidak dapat dihindari, sehingga pada sebagian besar elite birokrasi kerajaan terjadi pergeseran orientasi untuk memihak Belanda. Mudah diduga kalau kemudian pengayoman raja-rakyat semakin menipis dan menurunnya kewibawaan penguasa tradisional.

Kondisi inilah yang menimbulkan gerakan protes di kalangan rakyat dan sejumlah elite bangsawan untuk menunjukkan idealisme yang kerap amat patriotik. Kekecualian ini tampak pada saat raja Sumbawa menolak kontrak dengan Belanda di tahun 1669. Sikap Sumbawa ini rupanya cukup diperhitungkan Belanda -- terutama sewaktu ibukota dipindahkan dari Selaparang ke kota Sumbawa (1673) -- yang disinyalir untuk dijadikan pusat perlawanan para bangsawan Gowa. Maka VOC segera mendaratkan tentaranya di Sumbawa (1674) untuk memaksa Sumbawa melepaskan Selaparang dengan sebuah perjanjian.

Sampai akhir abad 17 suhu politik terus-menerus memanas, yang ditandai dengan rasa tidak puas terhadap Belanda beserta dengan perangkat kolonialismenya. Kerajaan Tambora, Dompu, Bima dan Sumbawa yang telah Islam kemudian cuma menjadi medan pergolakan yang seakan tak kenal akhir. Pembunuhan, penghukuman, perampokan, suksesi pergantian tahta, dan perjanjian-perjanjian yang selalu gagal menjadi issue kolonial dan bahkan juga terlukis dalam historiografi tradisional. Penangkapan dan pembuangan raja yang membangkang juga bagian dari rutinitas Belanda, yang kerap kali diakhiri hukuman mati atau terpaksa menandatangani perjanjian untuk sebuah "penghambaan".<sup>20)</sup>

Gerakan protes lebih-lebih ditunjukkan sebagian bangsawan Bugis Makasar, yang tidak mau menerima Belanda menjadi tuan di negeri sendiri. Seringkali mereka mengancam kedudukan VOC di perairan Sumbawa. Teluk Saleh, teluk Bima, teluk Sape, dan perairan Pekat ataupun Tambora menjadi sarang penyamun. Tetapi VOC dengan meminjam tangan-tangan birokrasi tradisional kerap kali dapat menangkal keganasan para bajak laut ilanun, yang sebenarnya adalah sisa-sisa laskar Gowa.

Kini semakin jelas apa sebenarnya motif VOC melakukan subordinasi di Sumbawa. Sesungguhnya Belanda kurang tertarik terhadap Sumbawa, karena secara ekonomis pulau itu tidak terlalu menguntungkan. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan, bahwa penguasaan pulau Sumbawa -- yang pada mulanya ingin menghapuskan mitos Makasar Raya di lautan timur Nusantara -- pada hakekatnya hanya untuk menghancurkan sisa-sisa pejuang Makasar yang telah menjadikan daerah itu tempat persembunyian dan basis perjuangan mereka.

### **Kelumpuhan Ekonomi di Masa Kolonial**

Sampai awal abad 19 keadaan sementara dapat dine-tralisir, meskipun secara insidental gerakan protes masih terus merongrong. Tetapi yang langsung merasakan akibat konflik itu adalah rakyat. Kesengsaraan yang panjang demikian akrab dengan mereka, namun tidak ada daya untuk keluar dari tirani kekuasaan kolonial. Perbudakan yang telah diperkenalkan para pedagang sejak abad 17 di Sumbawa telah menjadi momok-traumatis, sementara madat adalah surga bagi sebagian besar bangsawan di pulau itu.

Belum lagi lepas dari berbagai tindihan penderitaan, malapetaka menimpa rakyat Sumbawa. Di hari kelima, bulan April 1815 Gunung Tambora meletus, memuntahkan lahar dan debu panas selama sehari-hari. Akibatnya separuh dari jumlah penduduk pulau Sumbawa tewas, dan

Kerajaan Pekat serta Tambora lenyap. Betapapun relatifnya, perlu dicatat di sini laporan Zollinger tahun 1850 yang memperkirakan, 11.000 orang mati seketika, 37.825 orang mati kelaparan atau sakit, dan 36.275 orang mengungsi atau hilang, sehingga jumlah korban mencapai 84.200 orang dari 170.825 orang penduduk pulau Sumbawa sebelum letusan itu terjadi.<sup>21)</sup>

Orang-orang asing lainnya yang datang di masa kemudian melaporkan kehancuran dan kemelaratan penduduk. E. Francis yang singgah di sana tahun 1831 melukiskan -- walaupun mungkin ia mengutip sumber-sumber tradisi setempat -- betapa dahsyatnya letusan Gunung Tambora. Tanah tertutup debu setebal dua kaki selama lima hari, banyak rumah rusak dan semua tanaman binasa. Ikatan keluarga menjadi terputus, banyak suami menjual istri, dan ibu menjual anak hanya untuk ditukar dengan makanan. Banyak orang mati di jalanan dan banyak pula yang mencoba lari ke Jawa, Bali, Sulawesi, Timor, dan negeri-negeri sekitarnya.<sup>22)</sup>

Konflik politik yang terus bergolak selama hampir dua abad itu, sudah cukup terasa akibatnya, tetapi dengan bencana alam meletusnya gunung Tambora yang cuma beberapa hari saja, seluruh negeri kemudian mengalami kesengsaraan yang tiada tara. Malahan melumpuhkan ekonomi seluruh pulau, membawa penderitaan baru dan barangkali keputusan. Keadaan ini justru dimanfaatkan pedagang yang datang dari negeri lain untuk menarik keuntungan lebih. Segala harta benda yang dahulu berharga pada waktu itu tidak berarti lagi, terpaksa dijual dengan harga yang murah, karena mereka perlu makan. Penderitaan itu diperberat lagi oleh kedatangan para perampok yang menjarah kota dan desa, sehingga kehancuran semakin menjadi-jadi.<sup>23)</sup>

Dalam Syair Kerajaan Bima digambarkan, bahwa letusan itu terjadi sebagai hukuman Allah atas Sultan Tambora yang telah membunuh seorang Arab bernama

Haji Mustafa. Lalu dengan gencarnya seorang Haji Ali dengan penganut banyak mendesak rakyat agar meninggalkan madat, minuman keras, perhiasan berlebihan, berzina dengan orang asing, serta bernyanyi dan menari. Walaupun syair ini nampak berlebihan, setidaknya menunjukkan bahwa bencana itu telah melahirkan dampak moral yang di luar batas, sehingga diharapkan "kesalehan" menjadi bertambah.<sup>24)</sup>

## Penutup

Dalam geografi wilayah, Pulau Sumbawa merupakan areal kecil saja di antara pulau-pulau besar di Nusantara, tetapi dengan perjalanan sejarahnya yang cukup panjang daerah ini menjadi penting dalam historiografi Indonesia. Secara ekonomis letak Sumbawa cukup strategis karena berada dalam jalur perniagaan Malaka-Maluku di kepulauan selatan. Dengan dukungan sumber daya alamnya menjadikan daerah ini surplus hasil hutan dan peternakan yang dapat mensuplai permintaan (*demand*) para pedagang mancanegara selama kurun abad 15 – 16, namun strukturasi sosial yang diperlukan tidak dibarengi dengan re-organisasi masyarakat, sehingga eksistensi perdagangan bebas tidak bertahan lama.

Kemaharajaan Majapahit di Pulau Sumbawa sesungguhnya hanya *pro-forma* dan karenanya kultur Hindu-Jawa tak berhasil mengkondisikan sistem politik yang integral. Harus diakui di satu pihak pada masa kejayaan Indonesia Hindu ini secara kultural orang Sumbawa masih "intact", tetapi di lain pihak situasi itu menimbulkan persaingan antara penguasa tradisional dalam mencari legalitas kedaulatannya.

Sementara Makasar sebagai pintu gerbang jalur niaga di wilayah timur sedang menaik, Islam datang memberi motif politik bagi Kerajaan Gowa untuk memperluas kantong-kantong produksi. Dan, Sumbawa merupakan salah satu obyek hegemoninya. Agar monopoli atas daerah produsen dapat berjalan, subordinasi meru-

kan strategi ekonomi Makasar. Maka Islamisasi Sumbawa di awal abad 17 identik dengan Makasarisasi kerajaan taklukan.

Setelah perjanjian Bungaya, peranan Makasar digantikan VOC, namun loyalitas daerah vassal kepada *Karangk* telah berakar kuat, sehingga gerakan protes tidak dapat dihindari. Pada fase ini telah terjadi kemunduran ekonomi di seluruh tanah Sumbawa yang ternyata tidak lagi penting bagi VOC. Pada akhirnya subordinasi Kompeni Belanda atas Sumbawa hanya bersifat politis, sebagaimana dilakukannya pada bekas daerah vassal Makasar. Maka dengan tangan-tangan birokrat tradisionalnya eksploitasi Kompeni atas daerah jajahan menemui bentuknya hingga mencapai puncaknya menjelang dan sesudah Gunung Tambora meletus.

## CATATAN

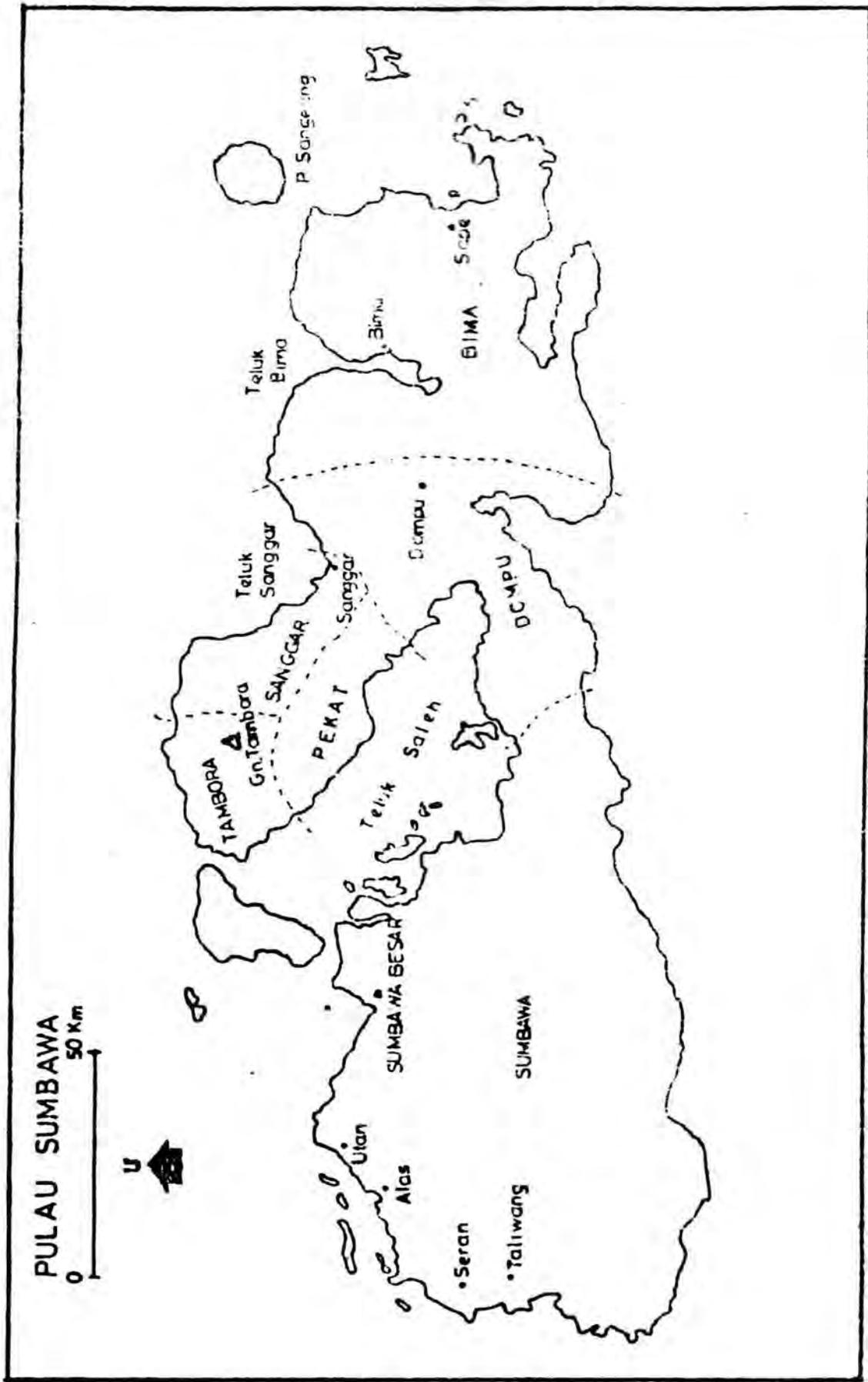
- 1). Kore merupakan pelabuhan laut Kerajaan Sanggar di utara P. Sumbawa. Selain itu dari pulau ini dieksport pula beras, daging, ikan, dan juga budak belian. Periksa: Manuel Godinho de Ereida, "Raport on the Golden Chersonese", transl. J.V. Mills, JRASMB, VIII, part I, 1930, h. 253 dan Armando Cortesao, *The Suma oriental of Tome Pires*, London; The Hakluyt Society, 1944, h. 200 – 203.
- 2). Cortesao, *The Suma*, h. 203; H. Zollinger, "Verslag van eene reisnaar Bima en Soembawa, en naar eenige plaatsen op Celebes, Saleijer en Floris, Gedurende de maanden Mei tot December 1847", *VBG*, 23, 1850, hl. 78 – 79 dan J. Noorduyt, "De Handelsrelaties van het Makassaarse rijk volgens de notitie van Cornelis Speelman uit 1670, *Neederlandsche Historische Bronnen*, 3, 1983, h. 104 serta M.A.F. Meilink-Roelofsz, *Asian Trade and European Influence*, The Hague: Martinus Nijhoff, 1962, h. 86, 102, 279.
- 3) Tentang masuknya pengaruh Hindu-Buddha di Sumbawa lebih lanjut periksa: W. Suantika, "Peninggalan Ciwa-Budha di Gowa Gajah (Bali) dan Wadu Pa'a (Bima)", *Forum Arkeologi*, No. 2, Februari 1990, h. 44 – 47.
- 4) Penaklukan Pulau Sumbawa oleh Majapahit kecuali diberitakan dalam *Nagarakertagama* pupuh LXXII/3 juga tertuang di dalam *Pararaton*. Kebenaran kedua naskah itu tidak dapat diragukan lagi, lebih-lebih setelah ditemukannya piagam Jawa dari abad 14 M di Pulau Sumbawa. Lihat: G.P. Rouffaer, *Notulen van de Directie-vergadering van Bataviaasch Genootschap*, 1910, h. 110 – 113; F.H. van Naersen, "Hindoe-Javaansche overblijfselen op Soembawa", *T.K.N.A.G.*, 1938, H. 90; dan Slametmulyana, *Nagarakretagama dan Tafsir Sejarahnya*, Jakarta: Bhratara, 1979, h. 145 – 146, 280.

- 5) Menurut tradisi setempat, Bima adalah tokoh pendawa kedua yang pada tahun 1575 datang dari Jawa ke Sumbawa, kemudian para *Ntjuhi* (kepala suku) sepakat merajakannya. Tetapi sang Bima menyerahkan jabatan raja kepada anaknya, Indra Jambrud. Lihat: Ahmad Amin, *Sedjarah Bima*, Kandepdikbud Bima, 1971, h. 10–12.
- 6) Kerajaan-kerajaan di P. Sumbawa saling berebut pengaruh, di antaranya Tambora dan Sanggar tetap menginginkan kemerdekaannya yang secara tradisional menjadi daerah taklukan Kerajaan Sumbawa dan Dompu, dan hal itu baru dapat diperoleh setelah kedatangan armada Makasar. Periksa Noorduyn, "Makasar and the Islamization of Bima", *10th Conference of the IAHA*, Singapore, 1986, h. 3 – 5.
- 7) Cortesao, *The Suma*, h. 203, 220.
- 8) Lalu Wacana et. al. *Sejarah Daerah Nusa Tenggara Barat*, Jakarta: Depdikbud, 1977/1978, h. 50.
- 9) M.C. Ricklefs dalam *A History of Modern Indonesia*, London; The Macmillan Press Ltd., 1982, h. 6 – 8 menyatakan bahwa Islam telah tersebar ke wilayah Indonesia Timur termasuk Sumbawa sejak akhir abad 13 hingga awal abad 16 yang dimulai dari Sumatera Utara. Dengan demikian sebelum Sunan Prapen, Islam telah lebih dulu diperkenalkan oleh para pedagang Jawa dan Melayu, dari Sulsel di antaranya Peta Manggalantung datang ke daerah ini dengan mengintegrasikan adat dan kebiasaan setempat ke dalam ajaran Islam. Lih. Lalu Wacana et. al., *Sejarah*, h. 75 – 76.
- 10) Noorduyn, *Een Achiende-eeuwse kroniek van Wadjo* (Dis.), Leiden; 's-Gravenhage, 1955, h. 98.
- 11) J. Noorduyn dalam "Makasar and", h. 1, 13–19 berpendapat bahwa Islamisasi di Sumbawa dilakukan dengan kekuatan bersenjata oleh Makasar. Pendapat-

nya didasarkan pada berita Portugis yang ditulis oleh 2 orang pendeta Kristen, Manuel Azevedo dan Ferreira yang gagal melaksanakan misinya di Bima karena ternyata di sana telah ada Ulama Islam dari Jawa dan Makasar.

- 12) Abdul Razak Daeng Patunru, *Sejarah Gowa*, Ujung Pandang; Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan, 1983, hl. 25.
- 13) Noorduyn, "Makasar and", h. 12.
- 14) Ibid, h. 13.
- 15) Ibid, h. 14.
- 16) Ibid, h. 15.
- 17) Daeng Patunru, Op. Cit., h.. 24 – 34.
- 18) Wata Wadu menjadi raja berkat campur tangan Makasar dan mendapat gelar Sultan. Dengan politik perkawinan hubungan Bima dan Makasar menguat hingga pengaruhnya meliputi aspek-aspek teknologi pembuatan rumah, motif kain tenun, kesusasteraan, tradisi menulis kisah sejarah serta dalam aspek sosial keagamaan yang banyak memiliki persamaan dengan Sulse. Periksa: Ahmad Amin et. al., *Adat Istiadat Daerah Nusa Tenggara Barat*, Jakarta: Depdikbud, 1977/1978, h. 23 dan juga Ahmad Cholid Sodrie, "Laporan Hasil Survey di Daerah Nusa Tenggara Barat", *Berita Penelitian Arkeologi*, No. 12, Jakarta, Depdikbud, 1985, h. 10–18.
- 19) Lalu Wacana et. al., *Sejarah*, h. 60.
- 20) Contoh dari keadaan ini adalah ketika Sultan Abdul Hamid dari Bima berlaku sebagai raja bawahan di depan Gubernur Belanda di Makasar, yang memang perlakuan ini dipertegas demi keutuhan wilayah kekuasaan Kompeni di Sumbawa. Lihat: Henry Chamberbert Loir, *Syair Kerajaan Bima*, Jkt-Bdg:, EFEO, 1982, h. 20.

- 21) H. Zoolinger, "Verslag", h. 124, melaporkan ketika ia berkunjung ke Bima 1847, madat masih sangat laku di semua lapisan masyarakat dan bahkan Sultan Bima sendiri pecandu berat.
- 22) E. Francis, *Herinneringen uit der levensloop van een Indisch Ambtenaar van 1815 tot 1851*, Batavia: Van Dorp, 1850–1860, Vol. 3, h. 23.
- 23) Chambert Loir, *Syair*, h. 23.
- 24) *Ibid*, h. 20–22.



## KEPUSTAKAAN

Amin, Ahmad. 1971. *Sejarah Bima*. Bima: Kandeptdikbud.

Amin, Ahmad. 1977/1978. *Adat Istiadat Daerah Nusa Tenggara Barat*. Jakarta: Depdikbud.

Sodrie, Cholid. 1985. *Laporan Hasil Survei di Daerah Nusa Tenggara Barat*. Berita Penelitian Arkeologi No. 12. Jakarta: Depdikbud.

Cortesao, Armando. 1944. *The Suma Oriental of Tome Pires*. London: The Hakluyt Society.

Zollinger, H. 1850. *Verslag van een rei snaar Bima en Soembawaen naar eenige plaatsen op Celebes, Saleiyer en Floris, Gedurende de manden Hei tot December 1847*. VBG. 23. Hlm. 78- 79.

Eride, Manuel Godinno, de. 1930. *Rapport on the Golden chersonese*. JRASMB, VII (1) Hlm. 253.

Francis, E. *Herrinneringen uit der levensloop van een Indische Ambtenar van 1815 tot 1851, Batavia: van Dorp*.

Wacana, Lalu. 1977/ 1978. *Sejarah Daerah Nusa Tenggara Barat* Jakarta: Depdikbud.

Meilink-Roelafsz. 1962. *Asian Trade and European Influence*. The Hague: Martinus Nijhoff.

Noorduyn, J. 1955. *Een Achttiende-eeuwse kronick van Wadjo (disertasi)*. Leiden: 's-Gravenhage.

Noorduyn, J. 1983. *De Handelsrelaties van het Makassaarse rijk volgens de Notitie van Cornelis Speelman uit 1670, Nederlandsche Historische Brouwen (3)*.

Noorduyn, J. 1986. *Makasar and The Islamization of Bima*. 10th Conference of the Singapura.

Naersen van, F .H. 1938. *Hindoe-Javaansche Overblijfselen op Soembawa TKNAG*. Hlm. 30.

Patunru, Abdul Razak Daeng. 1983. Sejarah Gowa. Ujung Pandang: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan.

Raffaer, G.P. 1910. Notulen van de Directie-vergadering van het Bataviaasch Genotschap.

Ricklefs, M.c. 1982. A History of Modern Indonesian. London: The Macmillan Press Ltd.

Slametmulyana. 1979. Nagarakretagama dan Tafsir sejarahnya. Jakarta: Bhratara.

Suantika,W. 1990. Peninggalan Ciwa-Budha di Gowa Gajah (Bali) dan Wadu Pa'a (Bima). Forum Arkeologi, No. 2 Him. 44-47.